

## **Transparansi dan Partisipasi Anggaran: Mutlak Harus Masuk Agenda Pembangunan Pasca 2015**

Tanggal 25-27 Maret 2013 berlangsung pertemuan keempat Panel Tingkat Tinggi (High Level Panel/HLP) tentang Agenda Pembangunan Pasca 2015. Presiden Indonesia merupakan salah satu pimpinan bersama Presiden Liberia dan Perdana Menteri Inggris. Pertemuan ini menjadi penentu kemana agenda pembangunan dunia akan diarahkan pasca MDGs?

Berkaitan dengan ini FITRA memandang penting untuk mendesakkan transparansi dan partisipasi dalam anggaran sebagai salah satu agenda pembangunan pasca 2015. **Zumrotin K Susilo Ketua Dewan Nasional FITRA**, dalam Forum CSO Global Pasca 2015 di Bali Tanggal 23-24 Maret mengatakan *"Konsep MDGs yang saat ini berlaku, tidak dirumuskan secara partisipatif, dan tidak mengharuskan pemerintah untuk mempublikasikan laporan sumber pendanaan yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Dengan tidak dilibatkannya masyarakat dalam penyusunan kebijakan-kebijakan pembangunan, dan juga tidak diikutsertakannya masyarakat untuk melakukan monitoring implementasi pembangunan yang dilakukan pemerintah, maka tidaklah mengejutkan jika pencapaian MDGS secara umum sangat mengecewakan"*.

Berdasarkan kajian FITRA, jika dilihat dari *trend* anggaran bagi program-program MDGs di tiap kementerian –walaupun belum sebanding dengan tantangan yang harus diselesaikan– kecenderungannya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya bidang kesehatan, rata-rata pertumbuhan anggaran khususnya Kesehatan Ibu dan Anak sebesar 14% selama periode 2006-2012, bahkan 2010-2011 sempat mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 38,6%. Sayangnya walaupun kecenderungan alokasi anggarannya naik, hasilnya terlihat tetap stagnan dan tidak ada kemajuan berarti, sehingga terkesan anggaran yang telah digelontorkan untuk program-program MDGs terkesan terbuang sia-sia.

Hal ini terjadi karena masyarakat sama sekali tidak dapat melakukan kontrol terhadap setiap program yang disusun dan dilaksanakan pemerintah. *"Contohnya salah satu program MDGs khususnya menyangkut kematian ibu dan anak yang ada di Kementerian Kesehatan, hampir sebagian besar anggaran (sekitar 75%) hanya dihabiskan untuk belanja perjalanan dinas (pertemuan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, monev, dll)"* ujar **Yenny Sucipto Manager Riset FITRA**, yang juga ikut dalam pertemuan ini.

Transparansi dan partisipasi memungkinkan warga negara dan aktor-aktor lain untuk dapat mempengaruhi penyusunan dan penerapan tujuan dan prioritas-prioritas pembangunan, memonitor apa yang pemerintah lakukan

dengan sumber daya publik dalam mencapai tujuan tersebut, serta memastikan Pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dengan dimasukkannya indikator dan target transparansi fiskal dan partisipasi dalam tujuan Post MDGs 2015, akan meningkatkan pentingnya hubungan/keterkaitan antara tujuan, alokasi pendanaan, implementasi kebijakan, dan monitoring capaian hasil.

Oleh karena itu FITRA meminta transparansi dan partisipasi anggaran harus disertakan dalam kerangka kerja pembangunan pasca 2015, melalui dua cara:

**Pertama**, seluruh negara diwajibkan untuk melaporkan secara berkala, investasi pendanaan yang mereka gunakan untuk membiayai setiap target dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam kerangka kerja pembangunan pasca-2015, dan juga melaporkan capaian hasil yang telah mereka capai melalui investasi tersebut. Dengan cara ini masyarakat bisa memonitor apakah pemerintah mengalokasikan anggaran pencapaian Goal secara memadai dan efektif.

**Kedua**, transparansi dan partisipasi anggaran juga harus dimasukkan sebagai target spesifik dalam agenda pembangunan pasca 2015. Target ini termasuk agar Pemerintah di seluruh Negara mempublikasikan 6 dokumen kunci anggaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Target ini juga harus mensertakan public hearing yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif pada saat penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran. Sehingga masyarakat bisa mengetahui seberapa besar komitmen pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Goal MDGs dibandingkan prioritas pembangunan lainnya.

Salam Transparansi,



**Yuna Farhan**  
**Sekjen FITRA**

**Contact Person:**

- 1. Zumrotin K Susilo (Ketua Dewan Nasional FITRA) 08159955744**
- 2. Yenny Sucipto (Manager Riset FITRA) 081310284741**